

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS**

#### **A. Kepramukaan; Definisi, Sejarah, Visi-Misi, Program dan Pendidikan**

##### **1. Definisi**

Ada *term* yang berbeda ketika kita menelaah kata Pramuka, kepramukaan, gerakan Pramuka dan pendidikan Pramuka.

Pramuka adalah “Warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka”, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, h. 4).

Kata Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka;

“Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. (SK. Kwarnas No. 231 Thn 20017).”

Dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Daerah, (2011, h. 6) dijelaskan bahwa Gerakan Pramuka adalah “Organisasi gerakan kepanduan nasional Indonesia sebagai lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan”.

Menurut Mario P. Manalu & Boni Fasius Simamora (2014, h. 1).

Kata “Pramuka” merupakan singkatan dari praja muda karena, yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkaya. Gerakan Pramuka disebut juga Gerakan Kepanduan, adalah lembaga

17

pendidikan non formal yang mengajarkan pengetahuan tentang Pramuka dan kegiatan-kegiatan kepramukaan serta tingkatannya kepada para pelajar dan kaum muda Indonesia pada umumnya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka.

Sedangkan pendidikan Kepramukaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2014, h. 4) diuraikan adalah “Proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik satu konklusi bahwa gerakan Pramuka merupakan nama organisasi pendidikan di luar sekolah dan luar keluarga, pendidikan kepramukaan lebih menunjuk kepada kegiatan anggota gerakan Pramuka dan Pramuka adalah anggota gerakan Pramuka. Sedangkan pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar yang praktis. Sungguhpun ada perbedaan *term-term* yang berkaitan dengan Pramuka tetapi ada hal yang sama yaitu bahwa semangat yang diusung kegiatan Pramuka muatannya adalah pembentukan kepribadian agar berbudi pekerti luhur bagi kaum muda yang bersifat suka rela dan dilaksanakan secara non formal.

## 2. Sejarah Pramuka

Tahun 1908, Mayjen Robert Baden Powell melancarkan gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Inggris, dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris, warga Inggris dan anggota masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya ketika itu. Beliau menulis “*Scouting for Boys*” sebuah buku yang berisi pengalaman di alam terbuka bersama pramuka dan latihan-latihan yang diperlukan Pramuka—sebagaimana diuraikan oleh Kemendikbud, (2014, h. 13) “Gagasan Boden Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak negara lain mendirikan kepanduan. Termasuk negeri Belanda dengan nama Padvinder atau *Padvinderij*”.

Gagasan kepanduan dibawa orang Belanda ke Indonesia yang pada masa itu merupakan daerah jajahan Hindia Belanda dengan mendirikan *Nederland Indischie Panvinders Vereeniging (NIPV)* atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia-Belanda.

Gerakan Pramuka di Indonesia didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, sebagai kelanjutan dan pembaharuan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Dengan keluarnya Kepres tersebut “Penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan gerakan Pramuka”. (Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2005, h. VI).

Kepanduan—demikian nama awal gerakan Pramuka ini—masuk ke Indonesia (pada waktu itu masih Hindia Belanda, karena negara kita sedang dijajah orang Belanda) awalnya dibawa oleh orang Belanda. Andri BOB Sunardi (2013, h. 37), menyatakan: “Organisasinya bernama *Nederland Indische Padvinders Vereniging* (NIPV) yang artinya adalah Persatuan Pandu-pandu Hindia Belanda”.

Bangsa kita mulai tertarik pada organisasi tersebut, dan karena sifatnya yang universal maka organisasi kepanduan dapat dengan cepat diterima oleh bangsa kita, apalagi kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan. Para remaja dan pemuda kita membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka dalam meningkatkan tanah airnya.

Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional membentuk organisasi-organisasi kepanduan—mengadopsi gagasan Baden Powell yang pada tahun 1908 melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak Inggris dan menulis buku “*Scouting for Boys*”—yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik yaitu sebagai kader pergerakan nasional.

Pada Panduan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Daerah, (2011, h. 12) dinyatakan: “Pada saat itu mulailah bermunculan organisasi-organisasi kepanduan, di antaranya *Javaanse Padvinders Organizatie* (JPO), *Jong Java Padvinderij* (JJP), *National Islamitje Padvinderij* (NATIPIJ), *Sarikat Islam Afdeling Padvinderij* (SIAP), Hizbul Wathan (HW) dan sebagainya”.

Berdirinya organisasi-organisasi kepanduan di beberapa daerah ini dianggap sebagai salah satu perjuangan dalam usahanya mencapai kemerdekaan.

Tonggak kebangkitan itu menemukan momentumnya, Andri Bob Sunardi (2013, h. 37), menyatakan: “Ketika bangsa Indonesia—dalam hal ini pemuda—mendirikan organisasi Boedi Oetomo, 20 Mei 1908. Lalu peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, yang menjiwai gerakan kepanduan nasional kita semakin bergerak maju (merupakan semangat nasionalisme)”.

Tetapi kemudian pemerintah kolonial Belanda melarang pemakaian istilah *Padvinder* bagi organisasi-organisasi kepanduan bangsa kita. Istilah “Pandu” dan “Kepanduan” dikemukakan pertama kali dalam kongres SIAP tahun 1928 oleh KH. Agus Salim di Kota Banjarnegara Kab. Banyumas, Jawa Tengah. (Andri Bob Sunardi, 2013, h. 38)

Peristiwa bersejarah terjadi ketika B-P dan Lady Baden Powell berkunjung ke Hindia Belanda (Indonesia), pada tanggal 3 Desember 1934, B-P singgah di Jakarta sepulangnya beliau mengikuti perhelatan Jambore Dunia di New South Wales, Australia.

Pandu Indonesia mengikuti Jambore pertama kali di Jambore Dunia V di Volegenzang, Belanda di tahun 1937 (Pandu Hindia Belanda).

Pada zaman pendudukan Jepang, organisasi-organisasi kepanduan dilarang sama sekali. Semua organisasi kepanduan harus bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan bentukan Jepang. Pada masa kemerdekaan berdiri lagi organisasi-organisasi kepanduan

hingga mencapai jumlah lebih dari 100 organisasi, yang tergabung ke dalam 3 federasi, yaitu IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia, 13-01-1951), POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri, tahun 1954) dan PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia). (Baca Pusdiklatda Kwarda Jabar, 2011, h. 12-13) dan (Andri Bob Sunardi, 2013, h. 38-39).

Kemudian terjadi peristiwa penting lainnya yaitu, Jambore Nasional Kepanduan pertama (sebelum jadi Pramuka) pada tahun 1955 di Psar Minggu Jakarta yang diselenggarakan oleh IPINDO.

Ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu dalam ikatan PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia). Sekitar 60 organisasi dengan sekitar 500.000 anggota pandu.

Akhirnya—sebagaimana diuraikan di atas—disadari bahwa banyaknya organisasi kurang baik untuk persatuan bangsa, maka pemerintah mengeluarkan Keppres No. 238/61 tentang Gerakan Pramuka, sebagai dukungan pemerintah dalam meningkatkan organisasi kepanduan di Indonesia. Keppres tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri RI saat itu, Ir. H. Juanda—karena Presiden Soekarno sedang melakukan kunjungan ke negara Jepang.

### 3. Dasar, Moto, Visi, Misi Pramuka

Dasar penyelenggaraan Gerakan Pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan:

- a. Undang-undang No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
- b. Keputusan Presiden RI No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka
- c. Keputusan Presiden RI No. 118 tahun 1961 tentang Penganugerahan Pandji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Pradja Muda Karana
- d. Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
- e. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 203 tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Setiap organisasi memiliki misi yang ingin dicapai dari sebuah aktivitas yang dilakukannya dan sebagai *paramater* untuk menilai tingkat keberhasilannya.

Gerakan Pramuka ini memiliki Moto: “Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan”.

Sedangkan visinya adalah: “Gerakan Pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah kaum muda”.

Misi Gerakan Pramuka sebagaimana diuraikan oleh Mario P. Manalu (20014, h. 14-15) adalah:

1. Mempramukakan kaum muda
2. Membina anggota yang berjiwa dan berwatak Pramuka, berlandaskan iman dan taqwa serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara
4. Menggerakkan anggota dan organisasi Pramuka agar peduli dan tanggap dalam meningkatkan masalah-masalah kemasyarakatan

Hal ini dilakukan untuk memantapkan jati diri Gerakan Pramuka melalui kode kehormatannya dan sekaligus sebagai pencerminan anggota Pramuka yang tanggap dalam meningkatkan kondisi sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitarnya.

Gerakan Pramuka ini memiliki Kode Kehormatan yang berisikan janji dan sikap moral serta budaya organisasi yang melandasi bagi para anggotanya.

Kode kehormatan adalah “Suatu norma (aturan) yang menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak (budi pekerti) yang tersimpan dalam hati seseorang yang menyadari harga dirinya”. (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Daerah Gerakan Pramuka Kwarda Jabar, 2011, h. 21).

Sedangkan yang dimaksud dengan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka, sebagaimana diuraikan oleh Tim PAH (2015, h. 55) adalah:

Budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku setiap anggota Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri dari Janji yang disebut Satya dan ketentuan moral yang disebut Dharma, keduanya merupakan satu unsur dari metode kepamukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan.

“Kode Kehormatan adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota Gerakan Pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota Gerakan Pramuka”, (Andri BOB Sunardi, 2013, h. 10). Kode Kehormatan ini terdiri dari janji (Satya) dan Ketentuan Moral (Darma). Satya Pramuka diucapkan secara sukarela oleh setiap calon anggota Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan.

Satya Pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan Darma Pramuka merupakan sebagai alat pendidikan mandiri yang *progresif* untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Selain itu juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayati, serta mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota masyarakat tersebut.

Darma ini, menurut Mario P. Manurung (2014, h. 17) berfungsi: “Sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan yang kegiatannya

mendorong peserta didik manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong”.

Darma Pramuka ini dapat pula direlevansikan dengan Kode Etik bagi organisasi dan anggota Gerakan Pramuka yang berperan sebagai landasan serta ketentuan moral dasar yang diterapkan bersama dengan ketentuan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya, pembagian dan pendelegasian tanggungjawab antar anggota serta pengambilan keputusan oleh anggota.

Kode Kehormatan bagi Pramuka disesuaikan dengan golongan usia perkembangan rohani dan jasmani peserta didik.

Sehingga dapatlah diambil sebuah *konklusi* bahwa Kode Kehormatan *identik* dengan harga diri atau kehormatan diri. Pelanggaran dalam meningkatkan Kode Kehormatan mengandung pengertian jatuhnya harga diri/kehormatan diri seorang Pramuka. Pelanggaran oleh anggota Pramuka dalam meningkatkan Kode Kehormatan akan dijadikan bahan pertimbangan rapat Dewan Kehormatan agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan dapat bergiat dalam satuannya lagi.

Pada catatan Tim PAH (2015, h. 55) dijelaskan secara terperinci tentang Kode Kehormatan Pramuka ini, yaitu:

- A. Dwisatya Pramuka Siaga. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku dalam meningkatkan Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tatakrma keluarga, setiap hari berbuat kebajikan

- B. Dwidarma; Siaga berbakti kepada ayah bundanya, Siaga berani dan tidak putus asa
- C. Trisatya Pramuka Penggalang; Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh: menjalankan kewajibanku dalam meningkatkan Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasadarma
- D. Dasadarma Pramuka; Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, Patriot yang sopan dan kesatria, Patuh dan suka bermusyawarah, Rela menolong dan tabah, Rajin, terampil, dan gembira, Hemat, cermat, dan bersahaja, Disiplin, berani dan setia, Bertanggungjawab dan dapat dipercaya, Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan

Ada hal yang menarik uraian dari Andri Bob Sunardi (2013, h. 10) ketika menguraikan tentang perbedaan Trisatya penggalang dengan Trisatya penegak, pandega dan anggota dewasa. Menurutnya, “Trisatya golongan penggalang tercantum kalimat mempersiapkan diri membangun masyarakat, maka pada Trisatya golongan penegak, pandega dan anggota dewasa kalimat tersebut berubah menjadi ikut serta membangun masyarakat”.

Dengan memperhatikan, moto, visi, misi dan Kode Kehormatan yang dimiliki oleh Gerakan Pramuka, maka piranti untuk memagari sebuah organisasi agar berjalan dengan baik dan acuan bagi para anggotanya semakin lengkap. Sehingga diharapkan organisasi dan para anggota berjalan dengan baik dan *on the track* dalam melaksanakan roda organisasinya.

#### 4. Program Kegiatan Peserta Didik

Program kegiatan peserta didik (*youth programme*) adalah keseluruhan (*totalitas*) dari apa yang dilakukan peserta didik dalam pendidikan kepramukaan (aktivitas), bagaimana aktivitas itu dilaksanakan (metode) dan alasan mengapa aktivitas itu dilaksanakan (tujuan).

Kegiatan pendidikan kepramukaan selalu mengikuti perkembangan jaman dengan metode yang menarik, menyenangkan dan menantang sejalan dengan kegiatan yang sedang menjadi kegemaran peserta didik. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan dimaksudkan supaya program yang disajikan dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka yang bernilai kreatif dan rekreatif.

Program pendidikan kepramukaan sarannya berbeda-beda; *Siaga* adalah anggota muda gerakan Pramuka yang berusia 7-10 tahun. *Penggalang*, anggota gerakan Pramuka yang berusia 11-15 tahun, kemudian *Penegak* dan *Pandega*, usia 16-20 tahun. Masing-masing memiliki materi dan program latihan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Panduan Pusdiklatda Kwarda Jabar (2011, h. 36):

Karena fokus penelitian ini pada peserta didik di tingkat SLTA, maka akan diuraikan secara khusus tentang ambalan penegak dengan materi dan program pelatihannya.

Penegak adalah anggota muda gerakan Pramuka yang berusia 16-20 tahun. Secara umum usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal yaitu masa pencarian jati diri, memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya kuat, agak sulit dicegah kemauannya apabila tidak melalui kesadaran rasionalnya, ada

kecenderungan agresif, sudah mengenal cinta dengan lain jenis kelamin.

Ambalan adalah satuan kelompok penegak yang terdiri atas 12-32 Pramuka Penegak. Kata ambalan (Jawa); *ambal-ambalan* yakni kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok orang.

Ambalan yang ideal memiliki markas ambalan, yakni tempat di mana ambalan itu berkumpul. Markas ini biasanya diberi nama Sanggar. Setiap ambalan memiliki bendera Merah Putih, bendera Pramuka, bendera Ambalan (bila ada), bendera WOSM, pusaka ambalan, sandi ambalan, tiang bendera, tali-menali, dilengkapi dengan peralatan tulis-menulis (komputer, printer) peralatan memasak, serta peralatan perkemahan, sebagaimana halnya peralatan gugus depan.

Untuk mengembangkan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan bagi Pramuka Penegak, dibentuk Dewan Penegak disingkat dengan Dewan Penegak yang dipimpin seorang ketua disebut Pradana, dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Seorang ketua yang disebut Pradana
- (2) Seorang pemangku adat (penjaga kode etik ambalan)
- (3) Seorang kerani
- (4) Seorang bendahara
- (5) Beberapa orang anggota

Dewan tersebut dipilih dari para pemimpin dan wakil pemimpin sangga, dipilih dari para pemimpin sangga dan atau wakil pemimpin sangga.

Pembina Pramuka Penegak dan Pembantunya tidak masuk dalam Dewan Ambalan. Pembina Ambalan bertindak sebagai penasihat, pendorong, pengarah, pembimbing dan mempunyai hak dalam mengambil keputusan terakhir. Dewan Penegak bertugas menyusun perencanaan, pemrograman, pelaksana program, dan mengadakan penilaian atas pelaksanaan kegiatan; menjalankan dan mengamalkan semua keputusan dewan; mengadministrasikan semua kegiatan satuan; dan keputusan dewan dibuat secara demokratis.

Di samping Dewan Penegak (Dewan Ambalan), untuk mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab Pramuka Penegak juga dibentuk Dewan Kehormatan Penegak yang terdiri atas para anggota ambalan yang sudah dilantik, dan diketuai oleh Pemangku Adat. Tugas Dewan Kehormatan Penegak adalah menentukan: pelantikan, penghargaan atas prestasi/jasa dan tindakan atas pelanggaran dalam meningkatkan kode kehormatan, peristiwa yang menyangkut kehormatan Pramuka Penegak, dan rehabilitasi anggota ambalan penegak.

## **5. Pendidikan Kepramukaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999, h. 232) menjelaskan hal berkenaan dengan istilah pendidikan sebagai berikut:

*Pendidikan* dari segi bahasa berasal dari kata dasar *didik* dan diberi awalan *men*, menjadi *mendidik*, yaitu kata kerja yang artinya

memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

Secara etimologi, menurut Hasan Langgulung (1984, h. 35), “Istilah pendidikan dalam bahasa Inggris adalah “*education*”, yang akar katanya berasal dari bahasa Latin “*educere*” yang berarti memasukkan sesuatu”. Barangkali yang dimaksud adalah memasukkan ilmu ke kepala seseorang. Jadi dalam hal ini, paling tidak ada tiga unsur yang terlibat, yaitu ilmu, proses memasukkan dan kepala orang—kalaulah ilmu itu memang masuk ke kepala.

Secara istilah, di kalangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, “pendidikan” mendapat arti yang sangat luas. “Kata-kata pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan, sebagai istilah-istilah teknis tidak lagi dibeda-bedakan oleh masyarakat kita, tetapi ketiga-tiganya lebur menjadi satu pengertian baru tentang pendidikan”. (Mochtar Buchori, 1989, h. 27).

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, Pasal 1 Ayat (1), dinyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Sedangkan Muhaimin (2002, h. 56) memberikan definisi tentang pendidikan:

Pengertian pendidikan bahkan lebih diperluas cakupannya sebagai *aktivitas* dan *fenomena*. Pendidikan sebagai *aktivitas* berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup (bagaimana orang akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan kehidupannya), sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosial. Sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.

Dari definisi di atas, memberikan indikasi bahwa pendidikan itu dilakukan secara sadar dan dirancang sedemikian rupa, tidak secara kebetulan. Sebagaimana diuraikan Ahmad D. Marimba (1981, h. 7). “Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik dalam meningkatkan perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”.

Dengan demikian dalam pendidikan terdapat beberapa unsur. *Pertama*, adalah usaha (kegiatan), usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar. *Kedua*, pendidik atau pembimbing atau penolong. *Ketiga*, ada yang dididik atau si terdidik. *Keempat*, bimbingan itu mempunyai sadar dan tujuan. *Kelima*, dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan.

Dalam tulisan lain, Herman H. Horne—sebagaimana diuraikan Muzayyin Arifin (1987, h. 18) menuliskan:

Pendidikan harus dipandang sebagai suatu proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik dengan alam sekitar, dengan sesama manusia dan dengan tabiat tertinggi dari kosmos. Dalam pengertian ini, maka proses pendidikan tersebut menyangkut proses seseorang dalam menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar. Sedang dalam pengertiannya yang lebih dangkal, dunia sekitarnyaapun melakukan penyesuaian diri dengan dirinya.

Pendidikan sesungguhnya dapat dilihat dari dua segi. *Pertama* dari sudut masyarakat, dan *kedua* dari sudut pandang individu. Pendidikan dari sudut pandang individu bahwa manusia di atas bumi ini mempunyai sejumlah atau seberkas kemampuan yang sifatnya umum pada setiap manusia, sama umumnya dengan kebolehan melihat dan mendengar, tetapi berbeda dalam derajat menurut masing-masing orang seperti halnya dengan panca indra juga. Ada orang yang penglihatannya kuat, pendengarannya lemah dan seterusnya. Dalam pengertian seperti tersebut, pendidikan dikotakan sebagai proses untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan.

Jadi pendidikan adalah “Memmanifestasikan yang tersembunyi (*latent*) pada anak didik” (Hasan Langgulung, 1989, h. 9). Dari pandangan masyarakat, menurut Hasan Langgulung (1989, h. 9) diakuinya bahwa “Masyarakat memiliki kemampuan-kemampuan asal dan bahwa anak-anak itu mempunyai benih-benih bagi segala yang telah dicapai dan dapat dicapai manusia”. Ia

menekankan pada kemampuan manusia memperoleh pengetahuan dengan mencarinya pada alam luar manusia. Di sini mencari itu lebih menekankan proses memasukkan wujud di luar seorang pelajar (*learner*). Dengan demikian pendidikan bermaksud memindahkan kesimpulan penyelidikan yang seseorang tidak dapat atau tidak perlu melakukannya sendiri. Oleh karenanya maka Hamdani Ali (1987, h. 12) memberikan definisi pendidikan adalah “Segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda untuk memungkinkannya melakukan fungsi hidupnya dalam kebersamaan dengan sebaik-baiknya”.

Pendekatan ketiga adalah memandang pendidikan sebagai suatu transaksi atau hubungan timbal balik yaitu proses memberi dan mengambil, antara manusia dan lingkungannya.

Dari beberapa pendekatan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pendekatan pertama, memandang pendidikan sebagai pengembangan potensi. Pendekatan kedua, cenderung melihatnya sebagai pewarisan budaya, sedang pendekatan ketiga memandang pendidikan sebagai interaksi antara potensi dan budaya. Perlu ditegaskan di sini bahwa ketiga pendekatan tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Yang mungkin adalah salah satunya mendapat penekanan lebih tinggi sedang yang lainnya tidak setinggi itu, namun ia juga memegang peranan dalam aspek-aspek tertentu.

Oleh karena banyak hal yang perlu dibina melalui pendidikan dan lagi-lagi para ahli mendapat kesulitan dalam mendefinisikan pendidikan. Ada yang penekanannya terletak pada pengajaran (*instruction*) dengan tokohnya Joe Park. Ada juga yang penekanannya pada keterampilan menggunakan pengetahuan seperti yang dikemukakan oleh Alfred North Whitehead, atau bahkan ada yang berpandangan bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan yang bermakna, seperti yang dikemukakan Theodore Meyer Greene, yang bisa kita lihat dari definisi ini aspek pendidikan sangat luas sekali. Oleh karena itu pula Ahmad Tafsir (1990, h. 6) mendefinisikan pendidikan adalah “Usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya”. Dari definisi ini maka cakupan kegiatan pendidikan yang melibatkan guru (pendidik), mencakup pendidikan luar sekolah, dan pendidikan dalam sekolah.

Gerakan Pramuka merupakan gerakan (lembaga) pendidikan yang komplementer dan suplementer (melengkapi dan memenuhi) pendidikan yang diperoleh anak/remaja/pemuda di rumah dan di sekolah, pada segmen yang belum ditangani oleh lembaga pendidikan lain yang pelaksanaannya menggunakan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan; di alam terbuka (*out door activities*) dan yang sekaligus dapat menjadi upaya “*self education*” bagi dan oleh anak/remaja/pemuda/pramuka sendiri.

Pendidikan dalam gerakan Pramuka diartikan secara luas adalah “Suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan atau kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat”. (Pusdiklatda Jabar, 2011, h. 15).

Sasaran pendidikan dalam arti luas adalah menjadikan peserta didik yang mandiri, peduli, bertanggungjawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Proses pendidikan dalam pendidikan kepramukaan terjadi pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif, dan menantang. Pada saat itu, di sela-sela kegiatan pendidikan kepramukaan tersebut pembina Pramuka memberikan bimbingan dan pembinaan watak.

Tentu pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan empat pilar yang disebut oleh UNESCO dengan istilah belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar menjadi seseorang (*learning to be*) dan belajar hidup bermasyarakat (*learning to live together*).

## B. Semangat Nasionalisme dan Peserta Didik

### 1. Definisi Nasionalisme dan Peserta Didik

“Memasuki era globalisasi—yang oleh Anthony Giddens disebut dengan *Runaway World* (dunia yang berlarian tunggang langgang)—dengan variabelnya ilmu pengetahuan dan teknologi”. Masduki Duryat, (2015, h. 56) dan ‘pergaulan’ negara yang tanpa batas (baik secara politik, ekonomi, maupun sosial), masalah nasionalisme tidak lagi dapat dilihat sebagai masalah sederhana yang dapat dilihat dari satu perspektif saja. Dalam dunia yang oleh sebagian orang disifatkan sebagai dunia yang semakin *borderless*, banyak pengamat yang mulai mempertanyakan kembali pengertian negara beserta aspek-aspeknya. Masalah pembangunan nasionalisme di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan yang berat, maka perlu dimulai upaya-upaya untuk kembali mengangkat tema tentang pembangunan nasionalisme. Apalagi di sisi lain, pembahasan atau diskursus tentang nasionalisme di Indonesia justru kurang berkembang (atau mungkin memang kurang dikembangkan).

Ini yang menjadi persoalan tersendiri dan menyisakan masalah, apalagi ketika nasionalisme ini direlevansikan dengan peserta didik—yang akhir-akhir ini sepertinya mengalami *degradasi* yang sangat mengawatirkan—seperti yang terlihat di media sosial dan realitas sebagian perilaku peserta didik (generasi muda). Agus Subagyo (2015, h. V) menguraikan:

Generasi muda penerus bangsa seolah-olah larut dalam budaya global dominan dan melupakan nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Gaya hidup, pola hidup, dan perilaku hidup kaum muda telah banyak berkiblat pada budaya populer (*pop culture*) yang sangat bernuansa ideologi kapitalis-liberalisme. Ideologi Pancasila yang merupakan warisan para founding fathers seakan-akan dilupakan dan tidak dipedulikan lagi. Segala kehidupan masyarakat sehari-hari telah diwarnai oleh gaya dan perilaku yang berpusat ke Barat sehingga sangat mengancam nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila.

Agus Subagyo (2015, h. v) ketika membicarakan tentang bela negara, melanjutkan bahwa “rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air yang merupakan unsur utama dari bela negaraturang mendapatkan prioritas bagi generasi muda”. Hal ini cukup mengawatirkan, apabila sikap ini dibiarkan karena generasi muda merupakan pewaris dan pelanjut pemabangunan bangsa ke depan.

Pada catatan Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014 (2014, h. 104) paling tidak ada beberapa persoalan kekinian yang menjadi tantangan nasionalisme—dalam hal ini empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara—salah satunya adalah:

Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberikan dampak negatif dalam meningkatkan kehidupan berbangsa. Kurangnya pemahaman, penghayatan dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain.

Kalau kita tilik dari segi definisi, nasionalisme berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999, h. 684) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki arti:

*Pertama*, kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta pemerintahan sendiri; *Kedua*, golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan *Ketiga*, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi.

Beberapa makna kata bangsa di atas menunjukkan arti bahwa bangsa adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan, dan tempat. Pengertian ini berkaitan dengan arti kata suku yang dalam kamus yang sama diartikan sebagai golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar.

Beberapa suku atau ras dapat menjadi pembentuk sebuah bangsa dengan syarat ada kehendak untuk bersatu yang diwujudkan dalam pembentukan pemerintahan yang ditaati bersama.

Kata bangsa mempunyai dua pengertian: pengertian *antropologis-sosiologis* dan pengertian politis. Menurut pengertian *antropologis-sosiologis*, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan persekutuan-hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota masyarakat tersebut merasa satu kesatuan suku, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Pengertian ini

memungkinkan adanya beberapa bangsa dalam sebuah negara dan sebaliknya satu bangsa tersebar pada lebih dari satu negara.

Nasionalisme adalah masalah yang fundamental bagi sebuah negara, terlebih-lebih jika negara tersebut memiliki karakter *primordial* yang sangat *pluralistik*. Klaim telah dicapainya *Bhinneka tunggal ika*, apalagi lewat politik *homogenisasi*, sebetulnya tidak pernah betul-betul menjadi *realitas historis*, melainkan sebuah agenda *nation-building* yang sarat beban harapan. Oleh sebab itu, ia kerap terasa hambar.

Terma nasionalisme secara etimologi berasal dari kata Latin "*nation*" (kata benda "*natio*" dari kata kerja "*nasci*" yang berarti dilahirkan) artinya "bangsa yang dipersatukan karena kelahiran". Namun arti dan hakikat yang melekat pada kata tersebut sudah berubah-ubah menurut ruang dan waktu serta disesuaikan dengan ideologi penafsirannya. Nasionalisme merupakan gejala sosio-politik yang berkembang secara dialektik, berakar di masa silam dalam hidup berbangsa serta tumbuh dan berkembang yang akhirnya terwujud semangat persatuan dengan dasar cita-cita hidup bersama dalam satu negara nasional. Nasionalisme bagi bangsa Indonesia merupakan suatu paham yang menyatukan berbagai suku bangsa dan berbagai keturunan bangsa lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konsep ini berarti tinjauannya adalah formal, yaitu kesatuan dalam arti satu kesatuan rakyat yang menjadi warga negara Indonesia (Bakry, 2010, h. 141).

Mengenai nasionalisme ini, menurut Kartodirjo (1992, h. 32) terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. "Nasionalisme merupakan sikap dan tindakan untuk mengatasi, mengusir dan melenyapkan

kolonialisme”. Jadi pengertian ini dalam arti perlawanan dalam meningkatkan bangsa lain dalam bentuk fisik.

Sedangkan Rochmadi (2007, h. 23) nasionalisme adalah “Suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai suatu bangsa. Nasionalisme merupakan hasil dari peranan faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual yang terjadi dalam lingkungan kebudayaan melalui proses sejarah”.

Dengan demikian pengertian nasionalisme dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang mempersatukan rakyat dan bercita-cita mendirikan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang berdaulat penuh, serta berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional.

Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara (dalam bahasa Inggris disebut *nation*) dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Nasionalisme juga ingin mempertahankan negaranya, baik dari gangguan internal maupun eksternal.

## 2. Peserta Didik

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur

pendidikan baik pendidikan formal, informal maupun nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Karena penelitian ini dilakukan di kampus, maka yang dimaksud dengan peserta didik adalah mahasiswa.

Kaitannya dengan Pramuka, maka yang dimaksud dengan peserta didik ini adalah mereka yang berusia sekitar 21-25 tahun dan *term* yang digunakannya adalah Pandega, yang juga disebut *senior rover*. Pusklatda Kwarda Jabar (2011, h. 36) menguraikan:

Secara umum remaja usia Pandega disebut sebagai remaja madya yang berproses ke arah kematangan jiwa dan kesadaran diri untuk memperjuangkan dan meraih cita-cita. Pada usia Pandega, sifat agresif sudah mulai mengendap, sosialitasnya semakin tinggi, dan pertimbangan rasionalnya semakin tajam. Sikap mandiri, tegas, idealis, dan santun terdapat dalam kesehariannya. Kreatif dan suka berkarya, kepatuhan yang tinggi dalam meningkatkan aturan, merupakan ciri seorang Pandega.

Tetapi fenomena sekarang cukup mengkhawatirkan, ketika sebagian mahasiswa mulai tidak tertarik lagi membicarakan nasionalisme. Apalagi ketika semangat nasionalisme ini dikaitkan juga dengan sikap patriotisme, peserta didik—termasuk generasi muda—lebih tertarik untuk mengikuti ajang ‘lomba academi’, *fashion show*, puteri kecantikan dan dunia *glamour* lainnya yang dapat secara *instant* menghasilkan ketenaran dan sejumlah uang. Akhir-akhir ini melalui media sosial dan juga media lainnya kita juga dapat melihat beberapa generasi muda yang foto selfie di atas patung pahlawan revolusi—dengan tanpa merasa bersalah—berekspresi dan cenderung melecehkan pengorbanan para pahlawan kita.

Hal ini misalnya diakui oleh Kartono, Dinas Pendidikan Jawa Tengah, se usai bertindak sebagai pembina upacara pembukaan Jambore Nasionalisme dan Ekstrakurikuler Kepramukaan 2015 menyatakan alasan bahwa:

Latar belakang diadakannya jambore tersebut antara lain ia mengatakan karena melihat fenomena akhir-akhir ini adanya dekadensi moral. Ada generasi muda yang mulai pudar semangat nasionalismenya. Adanya gerakan Pramuka dengan penyelenggaraan Jambore ini akan menanamkan semangat nasionalisme. Harapan dari adanya kegiatan ini adalah nanti akan muncul dari mereka semangat nasionalisme yang tinggi. Cinta dalam meningkatkan tanah air melekat luar biasa, sehingga punya sikap perilaku kebangsaan sebagai mana yang kita harapan bersama Bangsa Indonesia. (<http://beritaklaten.com/19/11/2015/semangat-nasionalisme-ditanamkan-lewat-gerakan-pramuka/>).

Esensi Gerakan Pramuka yang mengajarkan kepada generasi muda semangat *universalisme*, *humanisme* dan nasionalisme; seharusnya dapat menopang terealisasinya kebersamaan dalam beragam kondisi. Mentalitas mudah berempati tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan misalnya; akan mampu menghilangkan terjadinya budaya *individualistis* yang banyak menggejala dalam diri generasi muda.)

Diharapkan dengan kegiatan pramuka akan memunculkan semangat nasionalisme di kalangan peserta didik dan umumnya generasi muda Indonesia. Semangat nasionalisme yang mengebu-gebu pada generasi muda di jaman pra dan pasca kemerdekaan karena ada dan berkembangnya Pendidikan Kepanduan Nasional, juga diharapkan dapat bangkit dari revitalisasi Gerakan Pramuka pada setiap diri generasi muda di era globalisasi sehingga dapat berperan untuk menjaga kerangka "Indonesia Satu" menuju "Indonesia Jaya".

### C. Pramuka dan Semangat Nasionalisme

Persoalan nasionalisme dan pemuda merupakan diskursus yang hingga saat ini masih hangat dan selalu menarik untuk diperbincangkan. Persoalan ini patut menjadi perhatian berbagai pihak, karena memiliki peran strategis dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, perlunya perhatian juga dikarenakan menurunnya wawasan kebangsaan di kalangan pemuda.

Menurut Fauzan (2008, h. 48), “Menurunnya wawasan kebangsaan atau nasionalisme para pemuda pada prinsipnya merupakan ancaman bagi suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia”.

Sehingga Indonesia saat ini memerlukan *genre* baru untuk mereinterpretasikan ide nasionalisme yang secara fundamental telah dibangun oleh *founding father* seperti Soekarno. Soekarno kita akui sebagai individu yang mampu membentuk nasionalisme Indonesia dengan membangun satu sistem berantai melalui penyatuan kepentingan—dari kalangan Islam dan sekuler pada saat itu.

Namun, dalam proses pembangunan tahap awal ideologi nasionalisme nampak terjadi *dikotomi* antara Islam dan Nasionalisme itu sendiri. Kita harus mengakui sebuah gagasan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk tentu memerlukan proses. Di mana proses tersebut tentunya merupakan proses bersejarah dalam suatu bangsa. Saat ini nasionalisme sudah menjadi rapuh. Tentu

kita harus mulai menghidupkan kembali spirit dan etika nasionalisme sebagai sebuah praktek politik negara dan masyarakat dalam konteks Indonesia kekinian di tengah-tengah arus globalisasi.

Sumber dari kekuatan ideologi nasionalis saat ini memang belum ditemukan oleh banyak orang Indonesia sehingga ketika kita mencari arus apa yang seharusnya berada di depan kita sebagai energi yang menuntun kemajuan nasional negara dan masyarakat kita seringkali bimbang dan gelap. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan ini sebuah organisasi politik harus mampu menemukan sumber ideologi nasionalisme. Sekaligus mampu menggerakkan menjadi kekuatan utama dalam pencapaian tujuan politiknya. Sebenarnya sangat mudah kita temukan di mana sumber ideologi tersebut jika kita telah mencapai kesadaran penuh dengan kualitas yang sehat. Karena ideologi nasionalisme itu bersumber pada *mainstream* persatuan dan kesatuan.

Namun, pemahaman akan persatuan dan kesatuan sering kali menjadi kesalahan dalam ide dan prakteknya sehingga ketika kita berbicara tentang nilai tersebut kita tidak mampu mengambil kekuatan intinya. Persatuan dan Kesatuan memiliki arti *independen organik*, atau *sosial liberal* dalam konteks manifestasinya. *Independen organik* ini berarti sebuah penyatuan sosial secara individual dan kolektif. Ketika kita sebagai manusia tersadarkan melalui nalar, perasaan, dan gerakan kemanusiaan untuk suatu keadilan, kemakmuran, dan kemajuan. Dari sumber kekuatan nasionalisme ini kita akan bergerak ke arah revolusi nasional sebagai gerakan perlawanan dalam meningkatkan kejahatan dan ketidakadilan sistem yang mengatur manusia untuk kepentingan nafsu dan syahwat. Namun, dalam memaknai revolusi kita harus menyadari juga bahwa revolusi nasionalisme yang dimaksud di sini bukanlah revolusi berdarah yang menghadirkan konflik dan perpecahan nasional, karena kembali pada sumber ide

nasionalisme itu sendiri yaitu "persatuan dan kesatuan". (IJP DKI, Makalah, Jumat, 27 Januari 2012).

Sebagai organisasi kepemudaan yang mengembangkan pendidikan kepramukaan mempunyai kaitan erat sekali dengan pendidikan formal. Bahkan pendidikan kepramukaan merupakan ekstra kurikuler yang wajib dilaksanakan di setiap sekolah dasar dan menengah bahkan di sebagian perguruan tinggi baik negeri maupun swasta salah satu unit kegiatan memilih kegiatan pramuka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kepramukaan urgensinya sangat tinggi.

Dengan kebutuhan hidup manusia, bahkan pendidikan kepramukaan merupakan wujud dari usaha bela Negara. Tujuan pendidikan kepramukaan adalah untuk mendidik para peserta didik atau siswa agar memiliki semangat persatuan dan kesatuan yang kuat, memiliki aktivitas yang tinggi dalam kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Sekolah Dasar merupakan pendidikan awal agar peserta didik SD memiliki semangat persatuan dan kesatuan yang kuat, yang baik untuk menanamkan sikap Nasionalisme dan Patriotisme peserta didik.

Organisasi pramuka sudah barang tentu melakukan pendekatan dalam meningkatkan masyarakat lingkungannya, tetapi hal ini diharapkan lebih di tingkatkan frekwinsinya dan di jadikan program kerja yang nyata, sehingga organisasi ini melembaga dan benar-benar di rasakan keberadaannya oleh

masyarakat. Masyarakat merupakan wadah bagi organisasi pramuka mengimplemntasikan kegiatan yang berdampak positif buat keberadaan organisasi sendiri dan kehidupan masyarakat. Hal ini penting artinya agar pembinaan yang lakukan organisasi pramuka lebih luas cakupannya.

Hubungan yang dilakukan organisasi pramuka terbatas pada instansi pemerintah tertentu saja, terutama yang menaunginya. Seharusnya hal ini dilakukan berdasarkan paradigma baru dengan cara melahirkan terobosan yang terkait dengan aktivitas yang dijalankan, artinya organisasi pramuka sudah selayaknya menjalin hubungan dengan berbagai instansi pemerintah yang lainnya yang dapat memberikan kontribusi sebagaimana yang diharapkan. Artinya tidak sebatas di Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, dengan melihat *urgensitas eksistensi* kegiatan kepramukaan.

Diakui oleh Nur Syam bahwa:

Jika kita cermati, maka melalui Dasa Darma yang menjadi pijakan gerakan pramuka, dapat ditemui konsepsi yang sangat mendasar tentang kecintaan kepada bangsa, semangat nasionalisme, kemandirian, kreativitas, kejujuran, komitmen dan semangat bekerja keras. Menjadi pramuka identik dengan menjadi pemuda Indonesia yang mencintai tanah airnya dengan segenap karya dan pengabdian kepadanya. (<http://nursyam.uinsby.ac.id>)

Organisasi kepramukaan patut sekali mengikuti kegiatan masyarakat yang sesuai dan ada relevansinya, dengan kepramukaan kegiatan dimaksud di bidang keagamaan, olahraga, kesenian, gotong royong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting memelihara persatuan dan kesatuan. Hidup

bermasyarakat dan lain sebagainya, untuk melakukan hal tersebut sudah barang tentu perlu melakukan pendekatan dengan pihak terkait. Apabila hal tersebut terealisasi keberadaan organisasi pramuka dapat ditemukenali oleh masyarakat sehingga akan memberi dukungan mensukseskan program kerja organisasi ini.

Dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka pasal 11, menyebutkan bahwa pendidikan kepramukaan termasuk dalam jalur pendidikan non formal, sebagai salah satu pilar dalam sistem pendidikan nasional, yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan Pramuka, dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup. (<http://www.pontianakpost.com/tingkatkan-semangat-nasionalisme>)

Pramuka juga mengajarkan beberapa hal kepada seluruh bangsa Indonesia pada saat ini yaitu:Memupuk kembali rasa nasionalisme dan patriotisme, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, memupuk disiplin, berlatih dan melatih jiwa dan raga, dan banyak hal lainnya yang bisa dilakukan oleh Pramuka.

Selain beberapa hal di atas, gerakan pramuka juga memiliki banyak manfaat yang dapat diambil untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa patriotisme. Untuk itulah gerakan pramuka telah dikenalkan pemerintah kepada masyarakat melalui pendidikan baik ditingkat SD, SMP, SMA, bahkan juga sampai ke Perguruan Tinggi. Selain pendidikan formal tersebut pemerintah juga menerapkan pendidikan pramuka diluar pendidikan formal seperti ekstrakurikuler serta kegiatan lainnya yang bersifat kepramukaan.

Gerakan pramuka sebagai organisasi kepemudaan yang mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan pendidikan di luar sekolah untuk menyiapkan generasi muda sebagai tunas bangsa, pandu pertiwi penerima tongkat estafet perjuangan para pendahulunya dalam melanjutkan perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

#### **D. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa kalangan telah melakukan kajian berupa penelitian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Pramuka, Nasionalisme, kebijakan kegiatan ekstrakurikuler dan lainnya.

Aan Misbahuzaman, 2015 telah melakukan penelitian dalam tesisnya di UPI Bandung tentang “Pengembangan Nilai Nasionalisme Melalui Implementasi Program Wajib Pramuka di SMA Negeri 2 Bandung” dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus di Kelas X. Hasil penelitiannya adalah keunggulan program wajib pramuka menjadikan perilaku siswa menjadi teratur, terarah, memiliki etika dan karakter yang baik, baik untuk dirinya orang lain, bangsa dan negara. Kelemahannya masih banyak siswa yang tidak setuju pramuka diwajibkan karena menjadikan adanya unsur keterpaksaan.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Restisa Indah Septiani, 2015 tentang “Pelaksanaan Program Pengembangan Diri sebagai Upaya Menumbuhkan

Jiwa Nasionalisme di SMA Negeri 1 Lawang”, Universitas Negeri Malang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah program pengembangan diri yang dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme adalah kegiatan terprogram dan kegiatan tidak terprogram. Kegiatan terprogram melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan kegiatan tidak terprogram melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan kegiatan keteladanan. Pelaksanaan program pengembangan diri yang dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme salah satunya adalah pada pelaksanaan kegiatan terprogram melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler yaitu: Paskibra, Pramuka, PMR, Kesenian, Keolahragaan yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu dan wajib diikuti oleh semua siswa kelas X dan kelas XI.

Joko Sudrajad, Skripsi 2012 tentang “Hubungan Nilai-Nilai Kepramukaan, Karakter Disiplin dan Kerja Keras dalam meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Produktif di SMK PGRI 1 Ngawi”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan korelatif dan hasilnya;

Tidak terdapat hubungan antara nilai-nilai kepramukaan dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran produktif di SMK PGRI I Ngawi. Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa  $r_{hitung}=0.276$  dan  $r_{tabel}=0.468$ . Karena  $r_{hitung}$  (0.276) lebih kecil dari pada  $r_{tabel}$ (0.468) maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara nilai-nilai kepramukaan dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran produktif di SMK PGRI I Ngawi.

Tidak terdapat hubungan antara karakter disiplin dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran produktif di SMK PGRI I Ngawi. Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa  $r_{hitung}=0.450$  dan  $r_{tabel}=0.468$ . Karena  $r_{hitung}$ (0.450) lebih kecil dari pada  $r_{tabel}$ (0.468) maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat

hubungan antara karakter disiplin dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran produktif di SMK PGRI I Ngawi.

Tidak terdapat hubungan karakter kerja keras dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran produktif di SMK PGRI I Ngawi. Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa  $r_{hitung}=0.372$  dan  $r_{tabel}=0.468$ . Karena  $r_{hitung}(0.372)$  lebih kecil dari pada  $r_{tabel}(0.468)$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara karakter kerja keras dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran produktif di SMK PGRI I Ngawi.

Tidak terdapat hubungan antara nilai-nilai kepramukaan, karakter disiplin dan kerja keras dalam meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran produktif di SMK PGRI I Ngawi. Berdasar hasil perhitungan diketahui bahwa  $F_{hitung}=1.294$  dan  $F_{tabel}=3.34$ . Karena  $F_{hitung}(1.294)$  lebih kecil dari pada  $F_{tabel}(3.34)$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara nilai-nilai kepramukaan, karakter disiplin dan kerja keras dalam meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran produktif di SMK PGRI I Ngawi.

Joned Bangkit Wahyu Laksono, 2013 skripsi tentang “Kebijakan penanaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa di SMA Negeri 1 Ambarawa”, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Penelitiannya dengan pendekatan kualitatif dengan hasil;

Bahwa perencanaan penanaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa di SMA Negeri 1 Ambarawa disusun dalam program kerja kemudian dikembangkan melalui silabus, RPP dan program-program. Program kerja tersebut merumuskan nilai-nilai nasionalisme ditanamkan melalui pengintegrasian nilai-nilai nasionalisme kedalam pembelajaran, kegiatan terprogram, dan pembiasaan. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai nasionalisme di dalam kelas dimulai dari guru mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diintegrasikan dengan nilai-nilai nasionalisme. Dalam pembelajaran guru menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang telah dirancang untuk menunjang pendidikan nasionalisme. Kegiatan terprogram dilaksanakan melalui memperingati Hari Besar Nasional, bakti Sosial, ekstrakurikuler, menghias kelas dengan tema nasionalisme. Pembiasaan dilaksanakan melalui upacara Bendera, memperdengarkan lagu-lagu Kebangsaan, mengibarkan Bendera di halaman depan sekolah oleh siswa setiap hari, membudayakan 3S (Senyum, Sapa, Salam), piket kelas, pemakaian pin Abita. Evaluasi penanaman nilai-nilai nasionalisme dilakukan secara terus menerus oleh guru

mata pelajaran terkait berdasarkan pengamatan/observasi dalam meningkatkan perilaku/sikap siswa dengan menggunakan alat penilaian skala sikap. Penilaian terkait dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme juga dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan proses pelaksanaan penanaman nilai-nilai nasionalisme yang dilakukan oleh guru mata pelajaran terkait.

Demikian, beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Tetapi peneliti menganggap bahwa ada sisi yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan karena objek penelitian ini adalah peserta didik di tingkat Penegak kaitannya dengan peran Pramuka dan semangat nasionalism